

## PERAN PENDIDIKAN DI DAERAH KONFLIK

Oleh: Muhammad Nur Wangid )\*

### *Abstract*

*The changes of political contelation had effect on communities behavior, above all urged by global alterations. The conflicts caused unfavourable conditions for young people, especially to educate them, because an ethnic or a member group is hostile each others. Peace education is a key for establishing a consensual peace and maintaining it over time. There are five essential elements in building a lasting peace through education. First, establishing public education that is compulsory and integrates the diverse members of society. Second, establishing the mutuality and positive interdependence underlying a peaceful society and teaching students the competencies and attitudes they need to engage in cooperative efforts. Third, teaching students how to engage in peaceful political discourse to make difficult decisions. Fourth, teaching students how to engage in integrative negotiations and mediation, and fifth, inculcating civic values.*

*Keywords: Education, Conflict*

### **Pendahuluan**

Suatu gejala penting yang terdapat dalam berbagai peristiwa di dunia selama beberapa dasawarsa terakhir adalah timbulnya gerakan-gerakan etnik, dengan adanya sukubangsa-sukubangsa dan golongan-golongan etnik yang menuntut otonomi yang lebih besar, atau bahkan kemerdekaan, dari negara tempat mereka bermukim. Kondisi demikian tidak terhindarkan di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal itu karena keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, yang dikenal memiliki kurang lebih 250 suku bangsa (Koentjaraningrat, 1993). Berbagai kepentingan di antara sukubangsa atau golongan etnis, atau antara sukubangsa dengan pemerintah sering menjadi pemicu terjadinya konflik pada suatu daerah. Adanya perasaan dirugikan, tidak adil atas suatu kebijakan, atau bahkan perasaan teraniaya sering menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Pada akhirnya kondisi konflik tersebut akan sangat merugikan bagi generasi muda yang bermukim. Terlebih mereka (para siswa) yang

---

\* Dosen jurusan PPB FIP UNY

sedang belajar di bangku sekolah.

Sementara itu, sejak tumbangnya rezim ORDE BARU, tahun 1998, terlihat kekerasan dalam masyarakat semakin meningkat. Jika pada masa sebelumnya masyarakat mengalami tindakan represif lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan akses warga negara sampai dengan penangkapan karena tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah untuk kemudian 'dibuang', bahkan penculikan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah (*state violences*). Setelah memasuki era reformasi kekerasan di dalam masyarakat lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, entitas sosial tertentu, atau bahkan satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya (*community violences*). Tindakan-tindakan kekerasan bahkan pembunuhan sering dipakai oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan satu persoalan. Perbedaan kepentingan sampai dengan masalah harga diri sering menjadi penyebab tawuran antar kampung, antar desa, bahkan antar etnis. Lebih lanjut, ketersinggungan satu kelompok anggota masyarakat atas perilaku satu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya tidak jarang menjadi pemicu kerusuhan masyarakat yang berbau SARA. Dari perspektif tersebut nampak ada pergeseran perilaku kekerasan yang terjadi, dari perilaku negara atau pemerintah berpindah pada anggota masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut perlu suatu pendekatan untuk mencari solusinya.

Sekolah melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan institusi yang diharapkan mampu mendidik siswa menjadi anggota-anggota masyarakat yang memiliki kompetensi untuk hidup bersosialisasi dan bermasyarakat dengan baik. Menjadi anggota masyarakat yang dapat saling menghargai kepentingan dan perbedaan adalah harapan yang diidam-idaman dari masyarakat yang pluralis.

#### **Cara-Cara Mencapai Perdamaian**

Cara untuk mencapai dan memelihara perdamaian dapat diklasifikasikan menjadi (Clark, 2001): perdamaian yang dipaksakan (*imposed peace*), dan perdamaian berdasarkan kesepakatan (*consensual peace*). Perdamaian yang dipaksakan merupakan akibat dari atau terjadi karena dominasi, kekuatan, kekalahan, dan pelaksanaan aturan. Kelompok yang lebih berkuasa mempergunakan

kemampuan militer dan ekonominya untuk memaksa kelompok yang tidak berdaya untuk mengakhiri permusuhan dan menerapkan persetujuan. Ada dua cara terjadinya perdamaian yang dipaksakan, yaitu memenangkan konflik atau adanya pihak ketiga yang lebih berkuasa untuk mendamaikan, misalnya polisi atau pemerintah menangani suatu permusuhan atau konflik di suatu daerah agar berdamai. Memang perdamaian yang dipaksakan bisa menekan konflik tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah secara mendasar dan tidak mampu menetapkan hubungan positif yang lama diantara pihak-pihak yang bertikai (Johnson & Johnson, 2005).

Perdamaian dengan pendekatan kesepakatan mendasarkan pada pencapaian persetujuan untuk a) mengakhiri kekerasan dan permusuhan, dan b) menetapkan suatu hubungan baru berdasarkan interaksi yang harmonis ditujukan pada pencapaian tujuan bersama, berbagi kepentingan secara adil, saling bergantung satu sama lain untuk memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki, dan menetapkan suatu identitas bersama. Dalam perdamaian berdasarkan kesepakatan, semua pihak percaya perdamaian tersebut merupakan keinginan bersama, sah (*legitimate*), adil, dan bermanfaat. Hal itu karena semua pihak berkesempatan secara adil untuk mempengaruhi keputusan yaitu memaksimalkan dan diwajibkan untuk mematuhi persetujuan, dan semua saling berusaha untuk meningkatkan hal serupa, sebab walaupun hanya minoritas yang kecil akan dapat melakukan sabotase dengan cara mengkhianati kesepakatan tersebut.

#### **Melembagakan Kesepakatan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian**

Ada lima tahap (Johnson & Johnson, 2005) dalam melembagakan kesepakatan perdamaian melalui pendidikan, yaitu a) menyelenggarakan pendidikan umum yang mewajibkan dan mengintegrasikan berbagai anggota masyarakat, b) memantapkan kebersamaan dan saling ketergantungan sehingga mendasari suatu masyarakat yang damai dan mengajari siswa kompetensi dan sikap yang diperlukan untuk terlibat dalam usaha-usaha kooperatif, c) mengajari siswa bagaimana terlibat dalam wacana politis yang damai untuk menjalani keputusan yang sulit, d) mengajari siswa bagaimana terlibat dalam negosiasi dan mediasi integratif, dan e) menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan.

### **Tahap Pertama: Menyelenggarakan Pendidikan Umum**

Agar pendidikan perdamaian berpengaruh pada anak dan remaja, maka mereka wajib mengikuti pendidikan atau sekolah. Suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan perdamaian adalah keberadaan wajib belajar dengan menyelenggarakan pendidikan umum. Ada beberapa alasan mengapa suatu sistem pendidikan nasional diperlukan. Pertama, pendidikan memberikan pada anak dan remaja memperoleh suatu imbalan mata pencaharian dan kebermaknaan kehidupan. Ketiadaan kesempatan pendidikan adalah suatu motivator umum untuk bergabung dengan kelompok teroris dan pemberontak di berbagai negara. (Jonhson & Johnson, 2005). Oleh karena itu, menyelenggarakan suatu sistem pendidikan umum adalah perlu untuk mencegah berlanjutnya kekerasan atau peperangan. Kedua, sistem sekolah swasta, seperti sekolah yang dibentuk oleh kelompok-kelompok agama atau yang lain, dapat dimungkinkan untuk mengeksploitasi idealisme dan komitmen anak-anak dan remaja pada agama, merasa dibohongi dan korban ketidakadilan sosial, dan tidak senang pada masyarakat untuk mengajarkan ideologi yang mendukung kekerasan atau perang dan mensosialisaikan anak dan remaja pada keyakinan membenarkan kekerasan sebagai suatu alat untuk memperoleh tujuan-tujuan politis dan agama. Ketiga, sekolah memberikan kesempatan untuk mengintegrasikan kembali anak-anak dan remaja yang telah berpartisipasi dalam kekerasan ke dalam kehidupan sipil dan membantu mereka menemukan kebermaknaan dan peran positif sebagai anggota masyarakat dan warga negara sipil. Pendidikan diperlukan untuk menghidupkan kembali kehidupan normal masyarakat dalam negara mencoba untuk mengakhiri konflik-konflik yang berujung pada kekerasan.

Keempat, sekolah menyediakan suatu wahana (*setting*) bahwa perdamaian bisa berlangsung dan dialami, tidak hanya dalam pembicaraan. Untuk dapat mengalami damai, sekolah harus mengintegrasikan dan kehidupan sekolah harus mencerminkan kebersamaan, kerja sama, wacana politis dan pembuatan keputusan, serta penyelesaian konflik secara konstruktif yang menjadi sifat dalam masyarakat damai. Perdamaian dianyam dalam kain kehidupan sekolah khususnya melalui

metode-metode pembelajaran. Hal itu dicerminkan dalam cara materi pelajaran diajarkan, konflik-konflik siswa-siswa dan siswa-guru ditangani, keputusan-keputusan dilakukan, dan pertentangan-pertantangan intelektual diselesaikan. Kebermaknaan dan relevansi pendidikan yang bermisi perdamaian muncul dari pengalaman pribadi siswa sehari-hari dalam membangun dan memelihara perdamaian di sekolah.

Kelima, sekolah menyediakan wahana bagi siswa untuk didik berbagai kompetensi dan sikap yang diperlukan untuk membangun dan memelihara perdamaian yang langgeng, bukan hanya sekedar informasi tentang perdamaian. Sumber-sumber sosial seperti individu-individu yang terampil dalam menjadi bagian suatu usaha kooperatif, pembuatan keputusan yang sulit, dan penyelesaian konflik secara konstruktif diperlukan dalam rangka perdamaian untuk dapat tumbuh subur dikembangkan melalui proses mengalami membangun dan memelihara perdamaian dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Karena kompetensi dan nilai-nilai perdamaian yang perlu dikuasai setiap siswa memerlukan waktu beberapa tahun maka mereka harus menyerap nilai-nilai kehidupan kelas dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Agar damai dapat dikembangkan maka hubungan positif harus ditegakkan diantara anggota-anggota kelompok yang sebelumnya bertikai. Para siswa diperkenalkan pada dunia budaya yang bertentangan melalui kurikulum yang dirancang untuk kelompok budayanya. Siswa secara budaya dan sosial diajarkan nilai-nilai, sikap, norma, dan berbagai informasi lain yang melatarbelakangi konflik berlanjut. Namun bagaimanapun juga pengintegrasian sekolah pastilah lebih sederhana dalam idenya daripada kenyataan konflik yang harus dihadapi antar kelompok yang bertikai. Memberi kesempatan untuk melakukan kontak tidaklah bermakna konflik akan reda dengan sendirinya, bahkan justru konflik dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu diperlukan kondisi-kondisi agar kontak dapat mengurangi permusuhan antar kelompok dan membangun hubungan positif diantara orang yang berbeda, yaitu (a) bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama – tidak ada persaingan antar kelompok; (b) interaksi pada tataran personal secara tulus, ikhlas, dan jujur; (c) persamaan status; (d) dukungan untuk melakukan

kontak dari otoritas dan norma-norma kelompok (Alport, 1954; Johnson & Johnson, 1989).

### **Tahap Kedua: Memantapkan Kebersamaan dan Saling Ketergantungan Positif**

Membangun perdamaian memerlukan kebersamaan untuk melaksanakan tiga hal, yaitu kebersamaan tujuan, kebersamaan manfaat dari pencapaian tujuan, dan persamaan identitas (Johnson & Johnson, 2005). Ketiga hal saling ketergantungan tersebut harus dilembagakan baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Perdamaian jangka panjang tergantung pada kepemilikan tujuan bersama yang menyatukan semua anggota-anggota masyarakat dalam suatu usaha bersama.

Tujuan bersama menjadi sangat menonjol dan cukup memaksa untuk mengatasi persaingan. Hal itu menjadi cerita masa lalu dari konflik diantara berbagai pihak, dan dinamika antar kelompok. Manfaat diperoleh dari pencapaian tujuan bersama yang diberikan secara adil diantara semua pihak. Kebersamaan juga dapat dicapai melalui suatu identitas yang mengatasi semua pihak yang menyebabkan semua warga menjadi anggota yang sama dari suatu kelompok. Kesamaan identitas diciptakan melalui menghormati budaya sendiri, menghormati budaya orang lain, mengembangkan suatu identitas superordinat (*superordinate identity*) yang mengatasi semua perbedaan identitas, dan berdasarkan identitas superordinansi diciptakan seperangkat nilai-nilai pluralistik.

Pendidikan yang bermisi perdamaian sangat peduli untuk mendorong sekolah memberi kesempatan kepada siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, membagi manfaat secara adil, dan mengembangkan suatu identitas superordinat yang mengikat semua siswa dalam sekolah. Cara yang paling mudah untuk melaksanakan hal tersebut adalah melalui pemanfaatan *cooperative learning* (Johnson, Johnson, & Holubec, 1998). *Cooperative learning* adalah penggunaan kelompok kecil dalam pembelajaran sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka, dan saling belajar. Dengan metode ini siswa berlatih mencapai tujuan bersama, mendistribusikan manfaat sebesar-besarnya untuk semua anggota, dan mereka memiliki identitas kelompok yang lebih penting dari pada identitas diri, sehingga terjadi saling ketergantungan yang positif.

### **Tahap Ketiga: Mengajari Siswa Manjalani Keputusan Yang Sulit**

Memelihara perdamaian mempersyaratkan keputusan yang sulit harus dibuat oleh anggota-anggota dari berbagai kelompok agar semua warga berkomitmen untuk melaksanakan keputusan. Hal-hal yang dilakukan dalam pendidikan yang bermisi perdamaian adalah melatih siswa menghadapi isu-isu yang sulit yang harus didiskusikan agar perdamaian dapat diciptakan dan dipelihara dengan baik; menetapkan suatu prosedur bahwa semua pihak setuju menggunakan diskusi untuk menangani isu tersebut; melatih siswa bagaimana mempergunakan prosedur secara terampil; dan memasukkan penggunaan prosedur ke dalam identitas dan system nilai pribadi siswa sehingga prosedur tersebut akan menjadi terbiasa digunakan. Jika tertinggal tidak terpecahkan, isu-isu yang sulit maka akan menghasilkan suatu pengulangan kekerasan atau peperangan. Agar bisa berdiskusi secara konstruktif tentang hal tersebut semua pihak yang terlibat memerlukan suatu prosedur pembuatan keputusan yang efektif. Suatu prosedur yang menyediakan suatu model diskusi politis melekat dalam demokrasi dan dapat dipergunakan dalam pengajaran akademis adalah *constructive controversy*. Suatu kontroversi muncul saat ide, pendapat, informasi, teori, atau kesimpulan perseorangan tidak sesuai dengan orang lain dan dua pihak yang senga mencari persetujuan. Kontroversi dipecahkan dengan melibatkan apa yang Aristoteles menyebut sebagai *deliberate discourse*, yaitu diskusi tentang keuntungan dan ketidakuntungan dari tindakan yang diajukan, dan ditujukan pada pensintesaan solusi yang menyenangkan, yaitu pemecahan masalah secara kreatif.

### **Tahap Keempat: Mengajari Siswa Menyelesaikan Konflik Secara Konstruktif**

Siswa harus belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif. Untuk membangun perdamaian semua siswa harus perlu memahami bagaimana menyelesaikan konflik dan secara konstruktif dan dengan jalan tanpa kekerasan. Dengan bekerja sama secara kooperatif, dan memecahkan konflik secara konstruktif sebenarnya bermakna menetapkan tahapan untuk rekonsiliasi dan memaafkan. Di dalam membangun dan memelihara perdamaian biasanya ada konflik yang sangat sulit

sehingga memerlukan ketrampilan semua bagian dari pihak yang bersengketa untuk memecahkannya. Penyelesaian konflik demikian secara konstruktif memerlukan penggunaan negosiasi secara integratif. Para siswa perlu mempelajari hal demikian sebagai bagian dari pendidikan perdamaian. Program resolusi konflik yang telah ada antara lain adalah *Theaching Student To Be Peacemakers Program* (Johnson & Johnson, 1996).

#### **Tahap Kelima: Menanamkan Nilai-Nilai Kewarganegaraan.**

Perdamaian yang berdasarkan konsensus dipelihara melalui penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Perdamaian berlangsung tergantung pada kebajikan dari pendukungnya, dan kebajikan direfleksikan dalam cara individu dan kelompok menyeimbangkan kebutuhannya dan kebutuhan dari masyarakat sebagai keseluruhan. Motivasi untuk berbudi luhur tercipta dari suatu perasaan memiliki sesuatu sebagai anggota masyarakat, suatu kepedulian pada masyarakat secara keseluruhan, dan suatu ikatan moral dengan masyarakat yang hidupnya dipertaruhkan. Ketika berbagai pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan ketika konflik ditangani secara konstruktif dalam pelaksanaan yang tegas, adopsi nilai-nilai warga negara akan mandasari kabajikan warga negara semakin meningkat (Johnson & Johnson, 2000).

Penanaman nilai-nilai tersebut harus didorong dan diasuh. Para siswa perlu menginternalisasi nilai-nilai reflektif dari kerjasama, kontroversi, dan negosiasi integratif, yang mencakup komitmen berpikiran baik, perasaan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam berkarya, menghormati usaha dan oranglain sebagai sesama manusia, memiliki integritas tingkah laku, berempati dan mempedulikan orang lain, menghargai perbedaan, senang membantu orang lain (Johnson & Johnson, 2005). Semua nilai-nilai kewarganegaraan demikian mendasari dan dapat ditingkatkan melalui kerjasama, kontroversi, penyelesaian konflik secara konstruktif yang berlangsung di sekolah.

#### **Penutup**

Perdamaian dapat dipaksakan dan dapat pula dilakukan berdasarkan consensus tentang tujuan, manfaat, dan pembagian berbagai sumber secara adil. Ada

lima elemen yang esensial dalam melembagakan damai melalui pendidikan, yaitu: pertama pendidikan dapat mempengaruhi siswa dengan adanya kewajiban belajar bagi semua warga negara; kedua, kebersamaan dan suatu kesadaran tentang perasaan senasib harus ditegakkan sehingga individu merasa bahwa tujuan dari kelompok manapun dapat dipenuhi jika hanya tujuan dari seluruh golongan lain juga terpenuhi. Suatu identitas superordinat akan mengikat berbagai perbedaan. Ketiga, anak-anak dan remaja jangan sampai tertinggal dalam pendidikan demokrasi. Penguasaan pembuatan keputusan demokratis dapat dicapai melalui sering tidaknya menggunakan prosedur konstruktif kontroversi dalam setting pembelajaran. Keempat, para siswa perlu memahami bagaimana menangani konflik secara konstruktif; dan kelima, penanaman nilai-nilai kewarganegaraan. Kelima elemen tersebut perlu diimplementasikan pada semua jenjang persekolahan. Pengalaman pribadi yang dihasilkan dari kerjasama dan pemecahan konflik secara konstruktif diantara siswa akan membawa pemahaman makna dan relevansi perdamaian dan keadilan, dan mendefinisikannya sebagai *way of life*.

#### Daftar Pustaka

- Alport, G. 1954. *The nature of prejudice*. Reading, MA: Addison-Weassley.
- Clark, I. 2001. *The post-cold war order: The Spoils of peace*. England: Oxford University Press.
- Johnson, D.W. & Johnson, R. 1989. *Cooperation and Competition: Theori and Research*. Edina, MN: Interaction Book Company.
- Johnson, D.W. & Johnson, R. 1996. Conflict resolution and peer mediation program in elementary and secondary schools: A review of research. *Review of Education*. 66, 459-506.
- Johnson, D.W., Johnson, R. & Holubec, E. 1998. *Cooperation in the classroom*. Edina, MN: Interaction Book Company.
- Johnson, D.W., & Johnson, R. 2000. Cooperative learning, values, and culturally plural classroom. In M.Leicester, C. Modgil, & S. Modgil (Eds.), *Values the classroom, and cultural diversity*. 15-28. London: Cussell PLC.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. 2005. Essential Componen of Peace Education. *Theory Into Practice*. 44 (4) 280-292.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Maiello, C., Oser, F., & Biedermann, H. 2003. Civic Knowledge, Civic Skills and Civic Engagement. *European Educational Research Journal*. Vol 2, 3. 384-395.